

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, UKURAN
PEMERINTAH DAERAH, DAN *LEVERAGE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Imarotul Ulya

NIM: 31402000001

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH
DAERAH, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021)

Disusun Oleh:

Imarotul Ulya

NIM : 31402000001

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan panitia sidang ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 15 Agustus 2024

Menyetujui :
جامعته الإسلامية

Pembimbing



Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK. 211402010

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH
DAERAH, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021)

Disusun Oleh :

Imarotul Ulya

31402000001

Telah di pertahankan di depan penguji

Pada tanggal 22 Agustus 2024

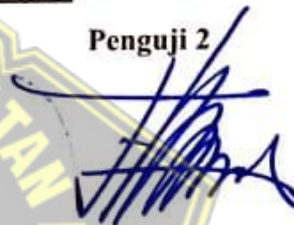
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211402010

Penguji 2



Dr. Chrisna Suhendi, S.E., MBA, Ak., CA
NIK. 210493034

Penguji 1



Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP
NIK. 211492003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Tanggal 28 Agustus 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., PhD, Ak., CA., IFP., AWP
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Imarotul Ulya
NIM : 31402000001
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 27 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Imarotul Ulya
NIM. 31402000001

INTISARI

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan merupakan bentuk dari akuntabilitas, dimana penilaian terhadap pengukuran kinerja keuangan saat ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan hasil pada program selanjutnya. Pengukuran kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai keluaran yang didapat setelah melaksanakan proses atau aktivitas.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Pada hal ini *stewardship* menekankan bahwa manajer atau pemimpin harus memiliki orientasi yang proaktif, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk mengelola aset dan sumber daya organisasi dengan hati-hati serta efektif seolah-olah mereka adalah “pengelola amanah” dari masyarakat (principal) sebagai prioritas utama atau pemangku kepentingan. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan erat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi melalui efisiensi bisnis, sehingga fungsi utilitas menjadi maksimal.

Penelitian ini mempunyai lima hipotesis yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif karena data yang digunakan untuk menganalisa berupa angka-angka untuk menguji seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Sumber data pada penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2019-2021 (Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Neraca) seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang diperoleh melalui situs website resmi situs resmi instansi setempat dan situs BPS (Badan Pusat Statistik).

Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, lalu data penelitian berupa data sekunder yang didapat dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan audit BPK, dan sumber lainnya yang relevan dalam periode waktu 2019-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sensus. Berdasarkan hasil teknik tersebut didapatkan data sebesar 105. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan aplikasi software SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”** (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021).

Penyusunan skripsi ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, petunjuk serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., PhD, Ak., CA., IFP.,AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Akt., CA selaku Dosen Pembimbing Pra Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan

penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan pra skripsi ini hingga selesai.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan sebagai pedoman dalam penulisan pra skripsi.
5. Seluruh staff, karyawan TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
6. Bapak Abdul Syukur, beliau yang menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Ibu Noor Laili I'ani, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan yang tiada henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Adikku Ia'natul Khoiriyyah, yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena dia termasuk orang yang telah menjadikan penulis untuk lebih kuat dan semangat. Raihlah cita-cita

yang selama ini diimpikan dan selalu ingat pada kedua orang tua. Terimakasih juga untuk kakak sepupu penulis, Mir'atuts Tsaniyyatul Munaa yang selalu memberi motivasi, arahan dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

9. Almarhum Kakek Jasdi Mustadjab yang sangat penulis cintai dan menjadin salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Beliau belum sempat penulis berikan kebahagiaan berupa rasa bangga, belum melihat penulis menyelesaikan pendidikan sarjana dan tidak bisa menemani sampai wisuda. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melapangkan kubur dan menempatkan kakek ditempat yang paling mulia disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
10. Keluarga JM, *especially* Om Farih, Tante Chimut, Om Huda, dan Tante Yayan yang selalu memberi dukungan berupa materi maupun motivasi agar penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku pejuang gelar Amryza, Lelya, Putri DN, Ananisa, Dhila, Nila, Rizal, Fais, Abidin, Cica, Ika, Melli Putri yang selama ini telah membantu dan banyak memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
12. Kepada teman-teman Akuntansi tahun 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah membantu dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

13. Jodoh penulis, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie "Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat"
14. *Last But Not Least*, kepada diri saya Imarotul Ulya yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih hidup dan berusaha walau seringkali merasa tertinggal atas segala pencapaian. Untuk diriku "apapun kurang dan lebih mu mari merayakan sendiri".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 29 Januari 2024

Penulis

Imarotul Ulya

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	i
INTISARI.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Masalah	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 <i>Grand Theory</i>	9
2.1.1 Teori <i>Stewardship (Stewardship Theory)</i>	9
2.2 Variabel Penelitian.....	11
2.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)	11

2.2.2	Pendapatan Asli Daerah	12
2.2.3	Dana Perimbangan	14
2.2.4	Belanja Modal.....	15
2.2.5	Ukuran Pemerintah Daerah.....	15
2.2.6	<i>Leverage</i>	16
2.3	Tinjauan Penelitian Terdahulu	17
2.4	Kerangka Penelitian Teoritis & Pengembangan Hipotesis.....	24
2.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	24
2.4.2	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
2.4.3	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.4.4	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
2.4.5	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	29
2.5	Kerangka Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Populasi dan Sampel	32
3.3	Jenis dan Sumber Data	33

3.4	Metode Pengumpulan Data	33
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	33
3.5.1	Definisi Operasional Variabel Pengukuran Variabel.....	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	37
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda	39
3.6.4	Uji Kelayakan Model.....	40
3.6.4.1	Uji Statistik F (Signifikan Simultan).....	40
3.6.4.2	Analisis Koefisiensi Determinasi	41
3.6.5	Uji Parsial (uji t)	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Hasil Penelitian.....	43
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
4.2	Analisis Data	45
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	45
4.3	Uji Asumsi Klasik	48
4.3.1	Uji Normalitas.....	48
4.3.2	Uji Multikolinieritas	50
4.3.3	Uji Heteroskedasitas	51
4.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	53

4.5	Uji Kelayakan Model	57
4.5.1	Uji Statistik F (Signifikan Simultan).....	57
4.5.2	Analisis Koefisiensi Determinasi	58
4.6	Pengujian Hipotesis	58
4.6.1	Uji Statistik (Uji t)	58
4.7	Pembahasan	61
4.7.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	61
4.7.2	Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	63
4.7.3	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	65
4.7.4	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	67
4.7.5	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	69
BAB V PENUTUP.....		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Keterbatasan	73
5.3	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian	44
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Variabel Kontrol.....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji t	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melaksanakan seluruh pekerjaan pemerintahan mulai dari perencanaan, pembangunan, pemantauan dan evaluasi. Otonomi daerah yang diterapkan selama ini di Indonesia merupakan wujud dari penerapan desentralisasi.

Penerapan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Selain itu, daerah dapat meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keberagaman daerah. Menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2015), otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri.

Adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah, dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam

sumber daya keuangan. Untuk itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut, (Abdullah & Febriansyah, 2015).

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menggalakkan seluruh potensi yang ada di daerahnya untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Untuk memahami sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, kita perlu menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam pembagunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Definisi inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan bidang keuangan daerah.

Keuangan daerah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah akan lebih mudah dicapai jika pemerintah daerah dalam kondisi keuangan yang baik. Keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari berbagai indikator yaitu pendapatan awal daerah (PAD), tingkat kemandirian daerah,

dan lain-lain. Namun keuangan daerah yang baik tidak akan tercapai jika pengelolaan keuangan daerah tidak memadai.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk analisis terhadap faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesenjangan yang signifikan, termasuk dalam memaksimalkan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan tambahan perspektif bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat (Antari & Sedana, 2018a).

Kinerja keuangan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dimana otonomi daerah telah menjadi elemen penting dalam reformasi pemerintahan, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin relevan. Salah satu perwujudan otonomi daerah dalam mengelola keuangan terdapat pada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah

satu daerah yang memiliki sektor perekonomian yang melimpah dan terus berkembang, hal ini dibuktikan dengan maraknya pembangunan-pembangunan yang sudah maupun sedang dilaksanakan. (Nurlita Martantri, 2019)

Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* (tingkat utang). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, sementara Dana Perimbangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah pusat. Belanja Modal mencerminkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Ukuran Pemerintah Daerah mencakup karakteristik pemerintah daerah yang dapat memengaruhi kebijakan dan pengelolaan keuangan. *Leverage* merujuk pada tingkat utang yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka.

(Maulina et al., 2021a) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Dana Perimbangan

berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mustanda, 2019) menghasilkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Darmayanti, 2019) menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maulina et al., 2021a), adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambah variabel independen *leverage*. *Leverage* dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi dapat diartikan sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Pada pemerintahan daerah perhitungan rasio *leverage* sangat penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Rasio *leverage* akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur seberapa mampu pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Kemudian cakupan wilayah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun anggaran 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021?
2. Sejauh mana Dana Perimbangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021?
4. Bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021?
5. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021.
2. Untuk menilai dampak Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021.
3. Untuk mengidentifikasi hubungan antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021.
4. Untuk menentukan pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021.
5. Untuk menilai sejauh mana *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi wawasan tentang Karakteristik Pemerintah Daerah yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, serta dapat mengembangkan literatur literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah agar daerah lebih maju. Kemudian manfaat untuk akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Menurut Donaldson & Davis, (1991) teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih mementingkan tujuan utama yaitu kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang dimana para manajer sebagai *steward* berusaha mencapai tujuan organisasinya (Sanjaya, 2017).

Teori *stewardship* menekankan bahwa manajer atau pemimpin harus memiliki orientasi yang proaktif, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk mengelola aset dan sumber daya organisasi dengan hati-hati serta efektif seolah-olah mereka adalah “pengelola amanah” dari masyarakat (principal) sebagai prioritas utama atau pemangku kepentingan. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan erat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Manajer akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi melalui efisiensi bisnis, sehingga fungsi utilitas menjadi maksimal (Olson, 2015).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu

berbuat dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principal* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat digunakan pada penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan profit lainnya (Indri Mustiani et al., 2022).

Keterkaitan antara teori *stewardship* pada penelitian ini ialah untuk bisa menguraikan bagaimana peran dan fungsi pemerintah sebagai lembaga atau instansi yang dipercaya dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakatnya, menampung aspirasi masyarakat demi terwujudnya keberhasilan organisasi, serta mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah diberikan. Dalam pertanggungjawaban tersebut peran *stewards* yaitu sebagai manajer serta pengaudit internal untuk dapat mengatur keefektifan pengendalian intern dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Teori ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya, dan wewenang. Para pemimpin diharapkan menjaga integritas dan mencegah tindakan korupsi atau penyalahgunaan lainnya. *Stewardship* memandang pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan agar menciptakan hubungan yang lebih baik antara organisasi dan masyarakat (Dinah 2023).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja berasal dari pengertian performance. Pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Natoen et al., n.d.).

Kinerja ialah tentang melakukan pekerjaan serta hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” (Natoen et al., n.d.).

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dari beberapa pengertian tersebut bisa di simpulkan adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan di bidang penyelenggaraan pemerintah yang dapat di nilai dengan uang. Setiap organisasi berkeinginan mencapai

tingkat kinerja tinggi. Untuk itu perlu mengetahui perkembangan pencapaian standar, target, dan waktu yang tersedia (Natoen et al., n.d.).

Pengukuran perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil akhir diperkirakan dapat dicapai. Apabila tidak dapat mengukur, maka tidak dapat mengelola pelaksanaan kinerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan (Natoen et al., n.d.).

Menurut (Anynda & Hermanto, 2020), Kinerja keuangan daerah merupakan komponen paling penting untuk mengukur suatu kinerja serta konsep dalam pengelolaan organisasi pemerintah dengan menjamin dalam menjalankan pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian dalam suatu program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal itu, jika program yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan tercapainya suatu kinerja keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan keberhasilan yang dapat mensejahterakan masyarakat (Anynda & Hermanto, 2020).

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari beberapa komponen dan mampu menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah dapat dipengaruhi oleh seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin.

Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

2.2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (UU Nomor 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan efektivitas biaya otonomi daerah. Pembagian dana perimbangan yang tidak merata, dapat berdampak pada ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, karena pada kenyataannya dana perimbangan hanya diberikan sebagai insentif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Puspita, 2018).

Potensi pendapatan tiap daerah tidaklah sama. Ada beberapa daerah dengan potensi pendapatan yang tinggi dan ada yang cukup rendah. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat berwenang untuk menyalurkan dana perimbangan ke setiap daerah di negara Indonesia. Dana perimbangan ini nantinya akan digunakan sebagai sumber dana tambahan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, baik dalam roda pemerintahan maupun roda perekonomian daerahnya (Maulina et al., 2021a).

Dana Perimbangan yang diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan PP Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri

dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2.4 Belanja Modal

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2016, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah akan membelanjakan sumber dana yang mereka miliki untuk kesejahteraan rakyatnya.

Belanja pemerintah daerah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diklasifikasi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja modal yang dibahas dalam penelitian ini merupakan belanja yang bersifat tidak langsung. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Maulina et al., 2021b) Belanja modal meliputi, antara lain, belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

2.2.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan

pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Asmaul Aziz, 2016).

Menurut (Natoen et al., n.d.) ukuran (*size*) pemerintah daerah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran pemerintah daerah digunakan untuk mengetahui besar kecilnya obyek dari pemerintah daerah tersebut yang dapat dilihat dari total aset pemerintah daerah (Nugraheni & Adi, 2020).

2.2.6 Leverage

Menurut (Kusumawardani et al., 2012) *leverage* adalah perbandingan antara hutang dan modal. Semakin besar *leverage*, maka akan memperbesar tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut pada pihak luar, sehingga akan menunjukkan kinerja yang rendah. Dalam sektor publik, rasio hutang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutangnya. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh hutang.

Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan hutang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang (Minarsih, 2015).

Menurut (Weill, n.d.) dalam (Saraswati & Rioni, 2019) mengungkapkan bahwa leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang dengan alasan daerah tersebut tidak mampu membiayai daerahnya dengan modal sendiri (Salsabilla & Rahayu, 2021).

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Temuan
1	Nurlita Martantri Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota di Jawa	Variabel Independen - Pendapata n Asli Daerah - Dana Perimbang an - Pertumbuh an Ekonomi - Leverage Variabel Dependen - Kinerja Keuangan Pemerinta	- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah - Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

		Tengah Tahun 2013-2017)	h Daerah	<p>Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah - Leverage berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
2	<p>Dwi Saraswati,S.Pd,M.Si Yunita Sari Rioni,SE,M.Si,Ak,CA</p> <p>Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi</p> <p>Tahun 2019</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah <p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah - Ukuran Pemerintah Daerah - Leverage 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hal ini dapat mencerminkan bahwa pendapatan asli daerah dapat memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. - Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh

				<p>terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa peran dari total aset belum dapat memberikan kontribusi 23 untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>- Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara tidak memperhatikan tingkat utang dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya.</p>
3	Ni Made Diah Permata Sari, Ketut Mustanda Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah	Variabel Dependen - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	- Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

	Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Tahun 2019	Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen - Ukuran pemerintah daerah - Pendapatan asli daerah - Belanja modal	pemerintah daerah di Kabupaten Badung - Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung - Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung
4	Ni Kadek Novia Indrawati Putri Ni Putu Ayu Darmayanti ² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Tahun 2019	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Variabel Dependen - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan	- Pendapatan asli daerah menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016 - Dana perimbangan menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

				daerah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016.
5	Rizki Artya Rahma Putri Dra. Lailatul Amanah, M.Si., Ak., CA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya Tahun 2020	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - Ukuran Pemerintah Daerah - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan	- Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian menunjukkan adanya pengaruh negatif secara signifikan. - Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian menunjukkan adanya pengaruh negatif secara signifikan. - Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio

				kemandirian.
6	Berti Indah Sari, Helmawati Jurnal Eksplorasi Akuntansi Tahun 2021	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat	Variabel Dependen - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - Pendapatan Asli Daerah - Dana Alokasi Umum - Belanja Daerah	- Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Dana berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. - Belanja daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7	Afia Maulina, Mustafa Alkamal, Nabilla Salsa Fahira Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research. Tahun 2021	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen - Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen - Pendapatan Asli Daerah - Dana Perimbangan - Belanja Modal - Ukuran Pemerintah Daerah	- Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. (H1 diterima) - Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. (H2 diterima) - belanja modal memiliki hubungan positif yang tidak

				<p>signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. (H3 ditolak)</p> <p>- Ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan positif yang tidak signifikan dengan variabel independen kinerja keuangan. (H4 ditolak)</p>
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambah pada variabel independen *leverage*. *Leverage* dapat berguna untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung kepada kreditor dalam mendanai aset daerahnya. Daerah yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi dapat dikatakan sangat bergantung pada pinjaman luar guna untuk mendanai asetnya. Pada pemerintahan daerah perhitungan rasio *leverage* sangat penting dilakukan bagi kreditor dan calon kreditor dalam membuat serta pengambilan keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang daerah tersebut.

2.4 Kerangka Penelitian Teoritis & Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh sehingga pelayanan dan kesejahteraan dapat meningkat. Untuk meningkatkan pembangunan daerah salah satunya melalui desentralisasi. Diterapkannya desentralisasi di pemerintahan diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemampuan suatu daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pengembangan daerah tersebut. Disamping itu, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan yang mengakibatkan kinerja yang menurun. Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani & Wibowo, 2017) menyimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan Menurut (Saputra, 2014) berpendapat bahwa peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan

asli daerah yang sah akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerahnya. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012), Julitawati dkk. (2012), Harumiati dan Payamta (2014), Budianto dan Alexander (2016), Juwita (2016) serta Ayu (2018) yang menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah (Pratiwi, 2018). Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah.

Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan apakah daerah tersebut memiliki sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk pemerintah daerah menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah yang sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu, dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun (Armaja et al., 2015).

Menurut penelitian (Digdowiseiso et al., 2022) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti, semakin tinggi dana perimbangan semakin menurun pula kinerja keuangan karena dana perimbangan tidak berasal dari kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah. Jika dikaji dengan Teori *Stewardship* dana perimbangan dikucurkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan kepuasan masyarakat. Semakin tinggi alokasi dana yang

diberikan maka akan memberikan dampak positif bagi daerah. Hal ini dapat berbeda jika dana perimbangan terlalu diandalkan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain terjadi ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk karena tidak dapat mengeksplorasi potensi daerah.

H2 : Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal merupakan kelompok dari belanja daerah, yang dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap tak berwujud. Mohammed dan Salihu (2015) berpendapat bahwa belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan memberikan manfaat jangka panjang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif pada kinerja keuangan daerah. Menurut (Lathifa, 2019), belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.

Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang sangat baik kepada

masyarakat, hal ini bisa diwujudkan dengan cara meningkatkan belanja modal. Tersedianya infrastruktur yang baik bisa menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat akan semakin tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerintah berhasil memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat. Semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan yang baik untuk masyarakat, maka kinerja keuangan pemerintah daerahnya dapat dikatakan semakin membaik.

H3 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah yang diprosikan dengan total aset yang dimiliki daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemudahan kegiatan operasional daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daerah. Selain kemudahan di bidang operasional, ukuran pemerintah daerah yang besar memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dan nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, semakin

besar ukuran pemerintah daerah dengan pengelolaan yang optimal diharapkan menghasilkan kinerja yang semakin baik pula.

Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat memberikan kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah. Sehingga dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dan nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Hal ini didukung dengan penelitian (Santik Kirana, 2020) dan (Nugraheni & Adi, 2020) yang mengemukakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4.5 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage memiliki hubungan dengan teori *stewardship* yang memiliki arti bahwa pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan pinjaman kepada pihak luar. Pemerintah daerah akan mengelola pinjaman daerah tersebut secara amanah sesuai dengan fungsinya yaitu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kesejahteraan masyarakat (Wismoyo Aji et al., 2020).

Leverage adalah rasio utang terhadap aset yang berguna untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki daerah terbebani oleh utang dengan cara membandingkan total hutang terhadap total aset daerah. Sehingga hasilnya dapat digunakan kreditor untuk mengukur kemampuan daerah dalam melunasi hutangnya. Semakin tinggi leverage yang dimiliki maka semakin buruk kinerja keuangan daerah. Artinya daerah tersebut tidak mampu membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan pinjaman dana dari luar (Indah Puspa Sari, 2016).

Hal ini didukung juga dengan hasil penelitian yang dilakukan (Saraswati & Rioni, 2019), (Fitasari & ismawati, 2020), dan (Kusumawardani et al., 2012) *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

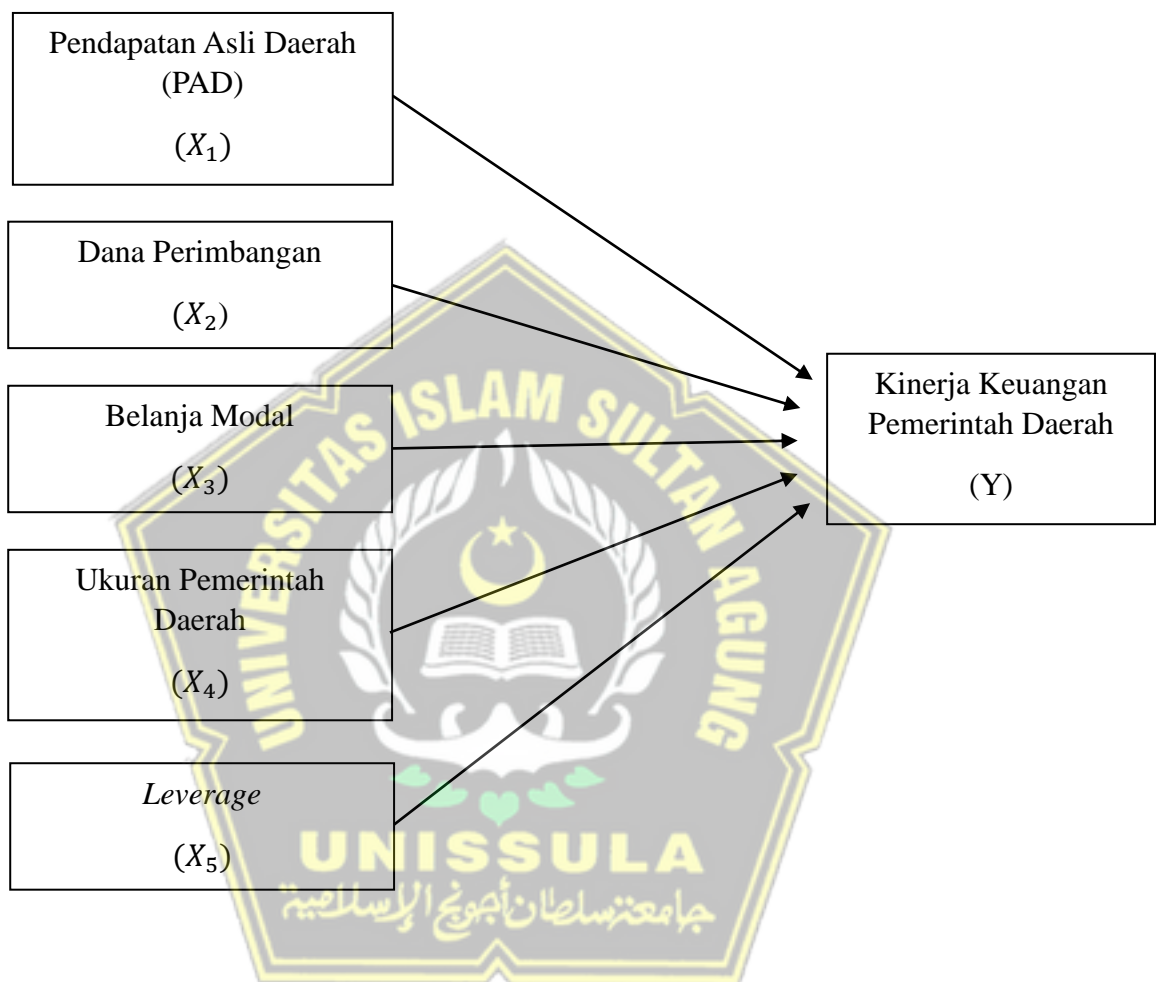
Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Leverage berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

2.5 Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage*), dan variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bentuk kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dimana teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota se-Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2021 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bagian daripada populasi disebut sampel. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah semua populasi sehingga penelitian ini memakai metode sensus.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif karena data yang digunakan untuk menganalisa berupa angka-angka untuk menguji seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Sumber data pada penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2019-2021 (Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Neraca) seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang diperoleh dari situs website resmi situs resmi instansi setempat dan situs BPS (Badan Pusat Statistik).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau publikasi dan sumber lainnya. Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil data dari laporan keuangan yang dibutuhkan secara online melalui permintaan informasi publik.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel didefinisikan sebagai suatu subyek yang memiliki ragam yang berbeda antar obyek (Rafika Ulfa, 2021). Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen didefinisikan sebagai variabel terikat yang besarnya tergantung dari variabel lain atau variabel yang perubahannya disebabkan oleh variabel

lain. Variabel independen didefinisikan sebagai variabel yang apabila muncul dapat mempengaruhi variabel lainnya dalam hal ini yakni variabel dependen.

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Variabel Dependen)
2. Pendapatan Asli Daerah (Variabel Independen)
3. Dana Perimbangan (Variabel Independen)
4. Belanja Modal (Variabel Independen)
5. Ukuran Pemerintah Daerah (Variabel Independen)
6. *Leverage* (Variabel Independen)

3.5.1 Definisi Operasional Variabel Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Rumus
1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	(Asmaul Aziz, 2016) dalam (Rusmita, 2019a) Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan	Rasio Efektivitas $= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$

		pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu).	
2	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, yang berfungsi untuk membiayai Pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Mulyani & Wibowo, 2017).	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
3	Dana Perimbangan	Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Perimbangan disebut juga dana transfer dari pemerintah yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan otonomi daerah (Indah Puspa Sari, 2016).	Dana Perimbangan = Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasi Khusus (DAK) + Dana Bagi Hasil (DBH) (Nurlita Martantri, 2019)
4	Belanja Modal	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode	$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Aisyiyah Yogyakarta,

		akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. (DJPK Kemenkeu, n.d.)	2017)
5	Ukuran Pemerintah Daerah (<i>size</i>)	Ukuran Pemerintah Daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut dengan melihat total aset yang dimiliki oleh suatu daerah (Inul Rofiq & Fefri Indra Arza, 2021).	Size = Ln Total Aset Pemerintah Daerah (Wijayanti & Suryandari, 2020)
6	<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan suatu daerah pada kreditur untuk membiayai aset daerahnya. Kreditur menggunakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Indah Puspa Sari, 2016).	$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$ (Indah Puspa Sari, 2016)

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah serta hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data untuk menguji hipotesis dan memecahkan masalah. Adapun alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 25.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Dengan statistik deskriptif, maka kita dapat mengetahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Data penelitian yang terdapat pada penelitian ini meliputi kinerja keuangan, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah (*size*), dan *leverage*.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Imam Ghazali, 2018) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi dari data residualnya normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji statistik non parametik One Sample Kolmogorov-smirnov (K-S). Apabila hasil One Sample Kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan apabila hasil One

Sample Kolmogorov-smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi dengan tidak normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel independent (Imam Ghozali, 2018). Model regresi yang baik apabila diuji maka tidak akan berkorelasi. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF-nya (Variance Inflation Factor) dengan bantuan program Statistical Product and service Solution (SPSS). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai Tolerance lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00 (Sugiyono, 2015).

3.6.2.3 Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghozali, 2018). Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini, maka akan digunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Jika koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2017) uji autokorelasi ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang dianggap baik apabila terlepas dari autokorelasi.

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat melalui statistik Durbin-Watson (DW), yaitu independensi antar residual. Hasil pengujian statistik Durbin-Watson berupa nilai DW akan dibandingkan dengan nilai statistik Durbin-Watson (tabel). Model regresi yang ideal tidak ada autokorelasi antar residual (Astuti, 2019). Aturan penolakan hipotesis null sebagai berikut (Ariefianto, 2012):

$4-dL < DW < 4$; Negative autocorrelation

$4-dU < DW < 4-dL$; Indeterminate

$dU < DW < 4-dU$; No autocorrelation

$dL < DW < dU$; Indeterminate

$0 < DW < dL$; Positive autocorrelation”

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik

turunkan nilainya). Analisis ini dilakukan jika variabel independennya minimal dua yang dimasukkan dalam model regresi ini (Sugiyono, 2015).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = kinerja keuangan pemerintah daerah

a = konstanta

$b_1 b_2 b_3 b_4 b_5$ = koefisien regresi model

X1 = pendapatan asli daerah

X2 = dana perimbangan

X3 = belanja modal

X4 = ukuran pemerintah daerah

X5 = *leverage*

ε = error term model (variabel residual)

3.6.4 Uji Kelayakan Model

3.6.4.1 Uji Statistik F (Signifikan Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel - variabel independen secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen. Uji kelayakan model dengan Uji F dapat dideteksi melalui langkah berikut:

a. Menentukan Hipotesis Statistik

- $H_0 : \beta_i = 0$, maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

- $H_a : \beta_i \neq 0$, maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Tingkat Signifikansi
- c. Tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05, hal tersebut berarti toleransi tingkat kesalahan adalah 0,05.
- d. Penilaian Kriteria Keputusan
 - Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - Apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

3.6.4.2 Analisis Koefisiensi Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menurut Sugiyono (2015) dapat digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) hanya antara 0-1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin kecil nilai koefisien determinasi (R^2) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2015).

Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan regresi berganda, maka yang digunakan Adjusted R square (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinan ditunjukkan dengan nilai Adjusted R square bukan R Square dari model regresi karena R Square bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan Adjusted R square dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2018).

3.6.5 Uji Parsial (uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2018). Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan leverage terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Menurut (Imam Ghozali, 2018) apabila probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun, apabila probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 - 2021.

Periode 2019-2021 mencakup fase sebelum dan selama pandemi COVID-19, yang merupakan periode dengan dinamika ekonomi dan kebijakan yang unik. Krisis global ini menyebabkan perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan respons kebijakan. Menganalisis periode ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana krisis mempengaruhi faktor-faktor keuangan dan kinerja daerah dengan fokus pada variabel seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage*, penelitian ini juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu kinerja keuangan yang krusial selama masa krisis. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tangguh dan responsif di masa depan.

Dengan fokus pada periode 2019-2021, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih konsisten terkait dengan kondisi dan kebijakan yang relatif stabil, memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara variabel yang diteliti tanpa gangguan perubahan kebijakan baru. Selanjutnya periode ini dapat membantu memahami dampak jangka panjang dari faktor-faktor ekonomi dan keuangan pada kinerja daerah sebelum dan selama krisis, serta bagaimana dampaknya dapat berbeda dibandingkan dengan periode pemulihan.

Sampel penelitian sebanyak 35 kabupaten/kota yang diperoleh dengan menggunakan metode sensus sampling. Data berupa *pooled data* yakni penggabungan *cross section* dan *time series* selama 3 tahun, dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105 sampel data.

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Sampel
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	35
Tahun Pengamatan	3
	105

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Analisis deskriptif pada penelitian ini mencakup variabel kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah (*size*), dan *leverage* yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

		Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	Ukuran Pemerintah Daerah (<i>size</i>)	<i>Leverage</i>	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
N	Valid	105	105	105	105	105	105
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4,3715	12,8894	15,7641	47,7605	1,0372	111,8742
Median		3,7170	12,9400	15,3720	38,2110	,8200	109,5620
Mode		3,51	5,22 ^a	6,59 ^a	21,43 ^a	,62	83,66 ^a
Std. Deviation		3,40177	3,38045	4,55183	32,16934	,69981	12,86970
Minimum		2,13	5,22	6,59	21,43	,05	83,66
Maximum		26,08	19,40	27,35	215,34	3,63	143,82

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai maksimum sebesar 143,82 yang dicapai oleh Kabupaten Purworejo pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum sebesar 83,66 yang dicapai Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 111,8742 dengan standar deviasi yaitu 12,86970. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 111,8742 lebih besar dari nilai median yaitu 109,5620 artinya nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva kinerja keuangan pemerintah daerah miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki nilai yang tinggi.

Variabel independen (X1) pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dengan nilai maksimum sebesar 26,08 yang dicapai oleh Kota Semarang pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum sebesar 2,13 yang dicapai Kota Pekalongan pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 4,3715 dengan standar deviasi yaitu 3,40177. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 4,3715 lebih besar dari nilai median 3,7170 berarti nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva pendapatan asli daerah miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel pendapatan asli daerah memiliki nilai yang tinggi.

Variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah dana perimbangan dengan nilai maksimum sebesar 19,40 yang dicapai oleh Kabupaten

Banyumas pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum sebesar 5,22 yang dicapai Kota Salatiga pada tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 12,8894 dengan standar deviasi yaitu 3,38045. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 12,8894 lebih kecil dari nilai median yaitu 12,9400 artinya nilai mean terletak dibagian kiri kurva distribusi frekuensi, sehingga data perimbangan miring ke bagian kiri. Dengan demikian rata-rata sampel data perimbangan memiliki nilai yang terendah.

Variabel independen (X3) dalam penelitian ini adalah belanja modal dengan nilai maksimum sebesar 27,35 yang dicapai oleh Kota Magelang pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum sebesar 6,59 yang dicapai Kabupaten Kendal pada tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 15,7641 dengan standar deviasi yaitu 4,55183. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 15,7641 lebih besar dari nilai median 15,3720 berarti nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva belanja modal miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel belanja modal memiliki nilai yang tinggi.

Variabel independen (X4) pada penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah (*size*) dengan nilai maksimum sebesar 215,34 yang dicapai oleh Kota Semarang pada tahun 2021. Sedangkan nilai minimum sebesar 21,43 yang dicapai Kabupaten Rembang pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 47,7605 dengan standar deviasi yaitu 32,16934. Nilai rata-

rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 47,7605 lebih besar dari nilai median 38,2110 berarti nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga ukuran pemerintah daerah (*size*) miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel ukuran pemerintah daerah (*size*) memiliki nilai yang tinggi.

Variabel independen (X_5) dalam penelitian ini adalah *leverage* dengan nilai maksimum sebesar 3,63 yang dicapai oleh Kabupaten Sragen pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,05 yang dicapai Kota Magelang pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 1,0372 dengan standar deviasi yaitu 0,69981. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang artinya data menyebar secara merata. Nilai mean 1,0372 lebih besar dari nilai median 0,8200 berarti nilai mean terletak dibagian kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva *leverage* miring ke bagian kanan. Dengan demikian rata-rata sampel *leverage* memiliki nilai yang tinggi.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Ghozali dan Ratmono (2017) menjelaskan bahwa model regresi yang baik adalah model yang memenuhi kriteria Best, Linear, Unbiased, dan Estimated (BLUE). Menurut Gauss-Markov dalam Ghozali dan Ratmono (2017) model regresi dianggap memenuhi kriteria BLUE apabila asumsi klasik terpenuhi. Pada data panel yang menggunakan sampel besar pada dasarnya tidak memerlukan uji normalitas sebagai syarat BLUE dan uji autokorelasi hanya terjadi pada data time series, sedangkan pada data panel yang memiliki ciri lebih dekat ke data cross section tidak dibutuhkan (Basuki

dan Yuliadi, 2015: 152–153). Penjelasan terkait uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut :

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual data pada model regresi linier berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0.05 , begitu pun sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0.05 maka distribusi residual data tidak normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov-smirnov.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	12,01286726
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,042
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,061 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,417 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound

		Upper Bound	,429
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test dengan total data sampel sebanyak 105 data, menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-smirnov sebesar 0,061 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan lulus uji normalitas.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Regresi data panel yang baik adalah jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors* (VIF), apabila $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Adapun hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	,188	5,318
	Dana Perimbangan	,856	1,168
	Belanja Modal	,921	1,085
	Ukuran Pemerintah Daerah (<i>size</i>)	,184	5,439
	<i>Leverage</i>	,841	1,189
a. <i>Dependent Variable</i> : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.4 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel penelitian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah (*size*), dan *leverage* mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 serta nilai Varians Inflation Factors (VIF) yang lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel, dengan demikian terbebas dari multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain atau tidak. Untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Ketentuannya yaitu apabila nilai

probabilitas > 0.05 , maka dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Tetapi apabila nilai probabilitas < 0.05 maka dalam model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan tabel hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,260	3,851		2,924	,004
Pendapatan Asli Daerah	,345	0,239	,322	1,447	,151
Dana Perimbangan	-,250	,213	-,232	-1,172	,244
Belanja Modal	,024	,156	,016	,154	,878
Ukuran Pemerintah Daerah (<i>size</i>)	-,020	,029	-,095	-,704	,483
<i>Leverage</i>	,435	1,038	,044	,419	,676

a. *Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Dari tabel hasil uji heteroskedastisitas tersebut di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) dan *Leverage* memiliki nilai probabilitas > 0.05 atau 5%, sehingga nilai tersebut dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya, melalui deteksi *Durbin Watson*. Kriteria uji *Durbin Watson (DW)* adalah apabila angka DW berada di d_U sampai dengan $4-d_U$ maka dinyatakan bebas autokorelasi. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi disajikan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,413 ^a	,170	,128	11,99914	1,940

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh hasil Durbin-Watson test sebesar 1,940. Dimana $1,940 > 1,7827$ (d_U), serta $1,940 < 2,2173$ ($4-d_U$). Sehingga, nilai DW sudah sesuai dengan ketentuan yakni nilai DW lebih besar daripada d_U dan nilai DW lebih kecil daripada $4-d_U$, atau sudah sesuai dengan konsep $d_U < DW < 4-d_U$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat atau bebas autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini analisis hasil yang dipakai adalah regresi linier berganda. uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 5

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Variabel Kontrol

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	132,211	,480		275,277	,000
	Pendapatan Asli Daerah	-,181	,063	-,048	-2,897	,005
	Dana Perimbangan	-,281	,030	-,074	-9,268	,000
	Belanja Modal	-,812	,021	-,287	-37,884	,000
	Ukuran Pemerintah Daerah (size)	-,017	,007	-,042	-2,595	,011
	Leverage	-2,243	,017	-,950	-	,000
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$KKPD = 132,211 - (0,181) X_1 - (0,281) X_2 - (0,812) X_3 - (0,017) X_4 - (2,243) X_5 + e$$

Keterangan:

KKPD = kinerja keuangan pemerintah daerah

X_1 = pendapatan asli daerah (variabel independen)

X_2 = dana perimbangan (variabel independen)

X_3 = belanja modal (variabel independen)

X_4 = ukuran pemerintah daerah (variabel kontrol)

X_5 = *leverage* (variabel kontrol)

e = koefisien error

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (*constant*)

Nilai konstanta α sebesar 132,211 yang memiliki arti apabila variabel pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2), belanja modal (X_3), ukuran pemerintah daerah (X_4) dan *leverage* (X_5) dianggap konstan, maka besarnya variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 132,211.

2. Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka -0,181 yang memiliki arti apabila pendapatan asli daerah (X_1) naik satu satuan maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,181. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

3. Dana Perimbangan (X_2)

Koefisien regresi variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka -0,281 yang memiliki arti apabila dana perimbangan (X_2) naik satu satuan maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,281. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan (X_2) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

4. Belanja Modal (X_3)

Koefisien regresi variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka -0,812 yang memiliki arti apabila belanja modal (X_3) naik satu satuan maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,812. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal (X_3) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

5. Ukuran Pemerintah Daerah (X_4)

Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka -0,017 yang memiliki arti apabila ukuran pemerintah daerah (X_4) naik satu satuan maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -0,017. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ukuran pemerintah daerah (X_4) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

6. *Leverage* (X_5)

Koefisien regresi variabel *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka -2,243 yang memiliki arti apabila *leverage* (X_5) naik satu satuan maka akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar -2,243. Hal tersebut menunjukkan bahwa *leverage* (X_5) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).

4.5 Uji Kelayakan Model

4.5.1 Uji Statistik F (Signifikan Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel- variabel independent secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2893,538	5	578,708	4,019	,002 ^b
	Residual	14109,978	98	143,979		
	Total	17003,516	103			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji F yang terdapat pada tabel 4.8 nilai F menunjukkan angka 4,019 dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.5.2 Analisis Koefisiensi Determinasi

Koefisien determinasi yang kemudian dilambangkan oleh *Adjusted R²* digunakan untuk mengetahui seberapa mampu variabel dependen dijelaskan oleh variabel independennya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,413 ^a	,170	,128	11,99914	1,940

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,128 hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage*) sebesar 0,128 atau 12,8%. Sedangkan sisanya yaitu 87,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Statistik (Uji t)

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4.10
Hasil Uji t

Model	t	Sig.	Kesimpulan
Pendapatan Asli Daerah	-2,897	,005	H ₁ : + signifikan (Hipotesis ditolak)
Dana Perimbangan	-9,268	,000	H ₂ : + signifikan (Hipotesis ditolak)
Belanja Modal	-37,884	,000	H ₃ : + signifikan (Hipotesis ditolak)
Ukuran Pemerintah Daerah	-2,595	,011	H ₄ : + signifikan (Hipotesis ditolak)
<i>Leverage</i>	-128,868	,000	H ₅ : + signifikan (Hipotesis diterima)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 menyajikan kekuatan hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Variabel pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,181 memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar -2,897 dan nilai sig sebesar $0,005 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak karena t hitung memiliki arah negatif, maknanya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dana perimbangan (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,281$ memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar $-9,268$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau $0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak karena t hitung memiliki arah negatif, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel belanja modal (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,812$ memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar $-37,884$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau $0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak karena t hitung memiliki arah negatif, maknanya belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel ukuran pemerintah daerah (X_4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,017$ memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar $-2,595$ dan nilai sig sebesar $0,011 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau $0,05$. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa H4 ditolak karena t hitung memiliki arah negatif, maknanya ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- Variabel *leverage* (X5) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,243 memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar -128,868 dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H5 diterima karena t hitung memiliki arah negatif, maknanya *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 - 2021, maka berikut merupakan pembahasan daripada hasil penelitian:

4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah diuraikan pada tabel 4.9 bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis (H1) ditolak. Artinya, apabila pendapatan asli daerah semakin besar maka terjadi penurunan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Selain itu, pemerintah daerah dalam penggunaan pendapatan asli daerah belum efektif dan efisien yang dibuktikan dengan proyek pemerintah daerah yang belum tepat sasaran. Beberapa contoh proyek yang mengalami kendala yaitu seperti proyek infrastruktur jalan lingkar selatan Semarang, proyek revitalisasi pasar johan Semarang, program bantuan sosial yang tidak merata di Kabupaten Brebes, proyek pengelolaan air bersih di Kabupaten Kendal, kualitas konstruksi yang buruk pada program pembangunan sekolah di Kabupaten Cilacap, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang di Semarang, dan lain-lain.

Berdasarkan data penelitian, tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di pemerintah daerah Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama periode 2019-2021, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi, namun mulai pulih pada tahun 2021.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurlita Martantri, 2019), (Nofa Angraini & Teguh Hidayat, 2023) yang menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* bahwa teori ini mengandaikan bahwa pejabat pemerintah (sebagai *stewards*) akan

mengelola sumber daya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara optimal dan efisien. Temuan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa dalam praktik, pemerintah daerah mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip teori stewardship. Faktor-faktor seperti pengelolaan yang tidak efisien, kepentingan politik, kurangnya pengawasan, dan keterbatasan kapasitas manajerial dapat menyebabkan PAD yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan.

4.7.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah diuraikan pada tabel 4.9 bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis (H2) ditolak.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah mengindikasikan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka dapat mencerminkan ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya semakin besar sehingga kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah, sehingga besar kecilnya penerimaan dana perimbangan

sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Putu et al., n.d.).

Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah karena jumlah dana perimbangan yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya kinerja keuangan daerah terutama pada ketidakmandirian daerah dalam mengelola daerahnya sendiri. Semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah rendah karena ketergantungan yang tinggi bersifat terikat sehingga membuat pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan dalam penggunaan sumber pendapatan (Prastiwi & Aji 2020, n.d.).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Nurlita Martantri, 2019), semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian (Putri & Darmayanti, 2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil penelitian ini mengindikasikan implikasi bahwa pemerintah daerah dalam penggunaan dana perimbangan diharapkan

dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan mempengaruhi kinerja keuangan. Pemerintah daerah perlu mengurangi penerimaan dana perimbangan dengan lebih meningkatkan pendapatan dari dalam daerahnya, sehingga dengan penerimaan dana perimbangan yang kecil pemerintah daerah dikatakan mampu untuk membiayai segala kebutuhan pemerintahannya dan nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori *stewardship* tidak sesuai dengan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah akan selalu bertindak dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan efisien dalam pengelolaan dana. Namun, dalam kenyataan, berbagai faktor seperti ketergantungan yang berlebihan pada dana perimbangan, kurangnya insentif untuk efisiensi, dan lemahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan penggunaan dana perimbangan yang tidak optimal, sehingga mempunyai dampak negatif pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah diuraikan pada tabel 4.9 bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis (H3) ditolak. Sehingga menunjukkan semakin tinggi belanja modal justru menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Maulina et al., 2021)

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang bersumber dari APBD untuk kegiatan investasi pemerintah daerah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Eva et al., n.d.). Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan. Faktor yang pertama adalah mungkin hal tersebut disebabkan oleh realisasi belanja operasional kabupaten / kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2021 terutama pada bagian belanja pegawai dan barang yang lebih dominan daripada belanja modal. Penambahan dana untuk dialokasikan pada belanja modal dapat melalui penekanan pada belanja pegawai, sehingga dana yang dialokasikan dapat dimaksimalkan untuk pengadaan infrastruktur untuk investasi daerah yang berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Faktor kedua adalah pengalokasian belanja modal tidak digunakan untuk aset produktif (Maulina et al., 2021). Pengalokasian belanja modal untuk aset produktif penting dilakukan karena hal tersebut dapat memicu optimalisasi potensi daerah terutama pada area pendapatan yang dapat menunjang kinerja keuangan pemerintah. Faktor lain adalah pengadaan infrastruktur oleh pemerintah tidak cukup memotivasi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan daerah, sehingga hal tersebut belum mampu mendorong pendapatan suatu daerah secara signifikan (Fernandes dan Putri, 2022).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Antari & Sedana, 2018b), (Nauw, n.d.), (Maulina et al., 2021b) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut (Antari & Sedana, 2018) keberhasilan kegiatan belanja modal juga dapat dilihat dari segi mutu yakni apakah realisasi belanja sesuai dengan yang dihasilkan, kesesuaian pelaksanaan belanja modal dengan waktu yang telah ditetapkan, realisasi belanja modal berorientasi pada kepentingan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori *stewardship* tidak sesuai dengan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah akan selalu bertindak secara efisien dan bertanggung jawab dalam pengelolaan belanja modal. Namun, dalam kenyataannya, berbagai faktor seperti ketidakefisienan, pertimbangan politis, kurangnya kapasitas pengelolaan, penyalahgunaan dana, dan kesalahan perencanaan sering kali mengakibatkan belanja modal yang tidak memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Hasilnya, bukannya meningkatkan kinerja keuangan, belanja modal yang tidak efektif justru dapat membebani anggaran dan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.7.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah diuraikan pada tabel 4.9 bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan demikian

hipotesis (H4) ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa peran dari total aset belum dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah yang diukur menggunakan total aset berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian. Hal ini berarti semakin besar total aset yang dimiliki pemerintah daerah Jawa tengah semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Artya Rahma Putri & Lailatul Amanah, n.d.)

Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah merupakan aset yang kurang produktif atau aset yang tidak dimanfaatkan guna memperoleh pendapatan daerah, seperti tanah dan bangunan yang kosong, aset properti komersial, dan lain-lain. Seiring dengan meningkatnya jumlah aset yang besar harus diimbangi dengan manajemen pemerintah daerah yang baik, dimana pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan dan mengelola aset yang dimiliki supaya memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ridho Nugroho & Eko Prasetyo, n.d.).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mustanda, 2019) dan (Saraswati & Rioni, 2019) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Teori *stewardship* tidak sesuai dengan ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan karena teori ini mengasumsikan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar akan bertindak lebih efisien, fleksibel, dan efektif dalam mengelola sumber daya. Namun, dalam kenyataannya, ukuran yang lebih besar sering kali dikaitkan dengan birokrasi yang tidak efisien, inefisiensi administratif, dan kesulitan dalam monitoring dan pengawasan, yang semuanya dapat menghambat kinerja keuangan. Hasilnya, alih-alih meningkatkan kinerja keuangan, ukuran pemerintah daerah yang besar dapat menurunkan.

4.7.5 Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah diuraikan pada tabel 4.9 bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis (H5) diterima.

Leverage merupakan rasio utang terhadap aset guna untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki daerah terbebani oleh utang dengan cara membandingkan antara total hutang terhadap total aset daerah. Sehingga hasilnya dapat digunakan kreditor untuk mengukur kemampuan daerah dalam melunasi hutangnya. Semakin tinggi *leverage* yang dimiliki maka akan semakin buruk kinerja keuangan daerahnya. Artinya daerah tersebut

tidak mampu membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan pinjaman dana dari luar. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah kurang memperhatikan tingkat utang dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati & Rioni, 2019) , (Rusmita, 2019b) , (Salsabilla & Rahayu, n.d.) , (Fitasari & ismawati, 2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori *stewardship* sesuai dengan temuan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena teori ini mengasumsikan bahwa pengelola akan bertindak dengan tanggung jawab, kehati-hatian, dan fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks ini, pengelola yang menerapkan prinsip *stewardship* akan berusaha menghindari peningkatan *leverage* yang berlebihan untuk menjaga kesehatan keuangan pemerintah daerah dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan efektif, serta menghindari risiko yang dapat merusak kinerja keuangan di masa depan.

**BAB V****PENUTUP****5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan alat statistik SPSS versi 25 dan analisis hasil yang telah dijabarkan pada bab 4, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan kemungkinan karena pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Selain itu, pemerintah daerah dalam penggunaan Pendapatan Asli Daerah belum efektif dan efisien yang dibuktikan dengan proyek pemerintah daerah yang belum tepat sasaran.

2. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah karena jumlah dana perimbangan yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya kinerja keuangan daerah terutama pada ketidakmandirian daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.
3. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh negatif antara belanja modal terhadap kinerja keuangan berarti apabila belanja modal mengalami peningkatan maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan. Belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2019-2021 belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan pendapatan. Kegiatan belanja modal adalah investasi pemerintah, tetapi tidak bertujuan mencari profit langsung.
4. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa peran dari total aset belum dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki pemerintah daerah Jawa Tengah semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya
5. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti besarnya nilai *leverage* yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa

Tengah dapat memengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin rendah nilai *leverage* maka kinerja keuangan pemerintah daerah dapat lebih baik.

5.2 Keterbatasan

1. Obyek penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2021. Oleh sebab itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada obyek di luar penelitian ini karena memiliki karakteristik yang berbeda.
2. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, *Size*, dan *Leverage* hanya dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,128 atau 12,8%. Sedangkan sisanya 87,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Untuk itu perlu menggunakan variabel lain untuk mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di luar model ini.

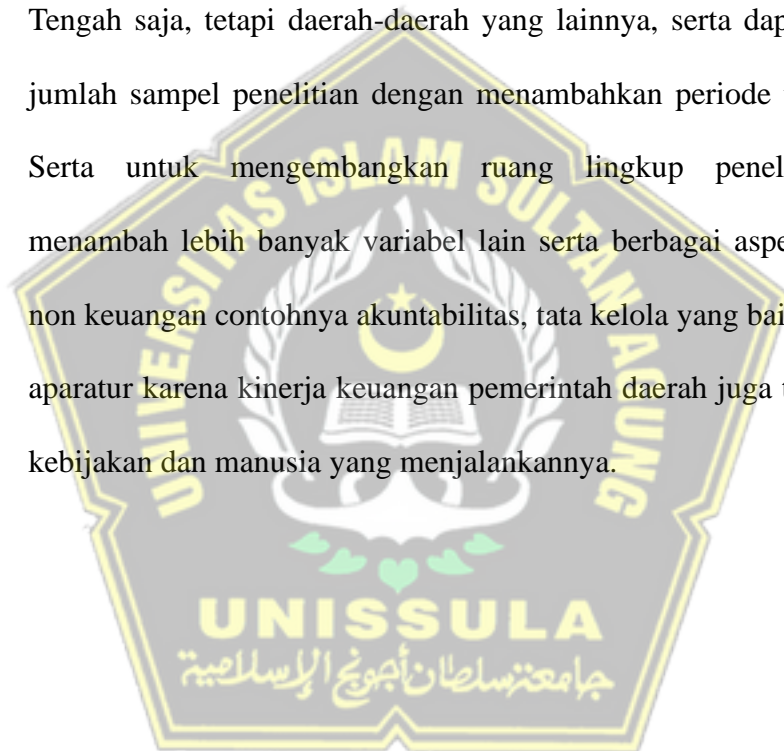
5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk memberikan perhatian lebih pada pengalokasian belanja modal untuk pengadaan infrastruktur guna meningkatkan produktivitas daerah yang berdampak pada peningkatan efektivitas kinerja keuangan. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pengambilan keputusan

dengan melihat faktor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage*, yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat.

2. Diharapkan penelitian selanjutnya semakin memperluas populasi yang digunakan, tidak hanya berfokus pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah saja, tetapi daerah-daerah yang lainnya, serta dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan menambahkan periode tahun terbaru. Serta untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian dengan menambah lebih banyak variabel lain serta berbagai aspek lain seperti non keuangan contohnya akuntabilitas, tata kelola yang baik, kompetensi aparatur karena kinerja keuangan pemerintah daerah juga terkait dengan kebijakan dan manusia yang menjalankannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Febriansyah. (2015). *Abdullah 2015*.
- Aisyiyah Yogyakarta, U. (2017). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Financial Ratio Analysis For Performance Appraisal At Gunung Kidul District Government Rigel Nurul Fathah A Articles Information Abstract E B B A N K* (Vol. 8, Issue 1).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018a). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2018.V7.I02.P19>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018b). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2018.V7.I02.P19>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018c). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2018.V7.I02.P19>
- Anynda, & Hermanto. (2020). *Anynda Hermanto 2020*.
- Armaja, Ridwan Ibrahim, & Aliamin. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh). *Aliamin Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2).
- Artya Rahma Putri, R., & Lailatul Amanah, D. (N.D.). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.
- Asmaul Aziz. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)*. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>
- Digdowiseiso, Subiyanto, & Cahyanto. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Djpk Kemenkeu. (N.D.). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?Ufaq=Apakah-Yang-Dimaksud-Dengan-Belanja-Modal>.
- Eva, H., Jdess, Y. S., & Silaban, Y. (N.D.). *789 Journal Of Development Economic And Social Studies Volume 2 No 4 Tahun 2023*. <https://doi.org/10.21776/Jdess.2023.02.4.07>

- Fitasari, & Ismawati. (2020). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Karanganyar): Vol. Ix* (Issue 1).
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. Bpfe Universitas Diponegoro.
- Indah Puspa Sari. (2016). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra)*.
- Indri Mustiani, Lukman Effendy, & Nurabiah. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. *Journal Ekombis Review*, 10, 403–418. <https://doi.org/10.37676/ekombis.V10is1>
- Inul Rofiq, & Fefri Indra Arza. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Skpd, Belanja Pegawai Dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Kusumawardani, M., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2012). Accounting Analysis Journal Leverage Terha-Dap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. In *Aaj* (Vol. 1, Issue 1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Lathifa, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021a). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.V5i2.373>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021b). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.V5i2.373>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021c). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.V5i2.373>

- Minarsih. (2015). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah*.
- Mulyani, & Wibowo. (2017). *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015)*.
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati,), & Ardiani, S. (N.D.). *Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017)*.
- Nauw, E. T. (N.D.). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.
- Nofa Angraini, & Teguh Hidayat. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* , 2.
- Nora Angelina, Yulia Efni, & M. Rasuli. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 4.
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/Mraai.V20i1.4398>
- Nurlita Martantri. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2017)*.
- Olson, D. L. , & W. D. D. (2015). *The Accounting Perspective. Enterprise Risk Management*.
- Prastiwi & Aji 2020. (N.D.).
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.V08.I05.P09>
- Putu, N., Putri, A. S., & Yuniarta, G. A. (N.D.). *Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*

Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.
<https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>

Rafika Ulfa. (2021). *Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan.*

Ridho Nugroho, T., & Eko Prasetyo, N. (N.D.). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur.* www.djpk.kemenkeu.go.id.

Rusmita, S. (2019a). Effect Of Regional Government Characteristics Of Financial Performance. *International Research In Economics And Finance*, 3(2), 29.
<https://doi.org/10.20849/iref.v3i2.703>

Rusmita, S. (2019b). Effect Of Regional Government Characteristics Of Financial Performance. *International Research In Economics And Finance*, 3(2), 29.
<https://doi.org/10.20849/iref.v3i2.703>

Salsabilla, S., & Rahayu, S. (N.D.). *The Effect Of Wealth, Leverage And Regional Expenditure On Regional Financial Performance (Case Study In Provincial Governments In Indonesia In 2019).*

Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). *The Effect Of Wealth, Leverage And Regional Expenditure On Regional Financial Performance (Case Study In Provincial Governments In Indonesia In 2019).*

Santik Kirana, A. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018). In *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani* (Vol. 8, Issue Desember).

Saputra, R. (2014). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)* Darwanis Universitas Syiah Kuala (Vol. 1, Issue 2).

Saraswati, & Rioni. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*

Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*

V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Pustaka Baru Press.

- Weill, L. (N.D.). *Leverage And Corporate Performance: A Frontier Efficiency Analysis On European Countries*.
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect Of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, Bpk Audit Findings And Opinions On Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V9i1.22483>
- Wismoyo Aji, M., Mukhibad, H., & Kunci, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. In *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas* (Vol. 3, Issue 1). www.jaga.unand.ac.id

